

ABSTRACT

Among the various rights of tourists, often the right to obtain accurate information about tourist attractions is neglected. It is even easy to find related to price opacity for MSMEs in several favorite tourism destinations, so this study aims to find out the implementation of legal protection by the Regional Government of Bangkalan Regency for tourists' rights to accurate information and what efforts are made by tourism entrepreneurs in providing legal protection for tourists related.

The research method used as a guide in carrying out this research is empirical law with two sources of data, namely primary and secondary. While data collection techniques will be obtained through interviews, observation, and literature studies which will then be analyzed using descriptive analysis analysis methods. The research method used as a guide in carrying out this research is empirical law with two sources of data, namely primary and secondary.

The results of the study show that the implementation of the legal protection of tourists' rights to price information in the MSME sector in Mangrove Ecotourism in Labuhan Village, Sepulu District, Bangkalan Regency has not been carried out optimally. However, the efforts of tourism entrepreneurs to provide legal protection for the rights of tourists in general have been proven through cooperation built with several parties such as PT. Ptamina with Labuhan Village.

Keywords : *Tourist, Tourist Entrepreneur, Legal Protection, Labuan mangrove ecotourism*

ABSTRAK

Diantara ragam hak wisatawan, sering kali hak untuk memperoleh informasi akurat tentang daya tarik wisata lalai terpenuhi. Bahkan dengan mudah ditemukan terkait keburaman harga pada sektor usaha mikro di beberapa destinasi pariwisata favorit, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan atas hak wisatawan tentang informasi akurat dan upaya apa saja yang dilakukan oleh pengusaha wisata dalam memberikan perlindungan hukum bagi wisatawan terkait.

Metode penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian ini yaitu hukum empiris dengan dua sumber data yaitu primer dan sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data akan diperoleh melalui wawancara, observasi, serta studi kepustakaan yang selanjutnya akan dianalisa menggunakan metode analisa deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan perlindungan hukum serta pemenuhan hak wisatawan atas informasi harga pada sektor usaha mikro di Ekowisata Mangrove Desa Labuhan, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan oleh Pemerintah Daerah dan Pengusaha Wisata belum terlaksana secara optimal akibat adanya pengalihan kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pengusaha wisata sehingga menghasilkan ketidakpuasan pada wisatawan.

Kata Kunci : Pariwisata, Pengusaha Wisata, Perlindungan Hukum, Ekowisata Mangrove Labuan.